

ABSTRAK

Sarifatul Hidayah, 18201502010064, *Problematika Pemeriksaan Nikah di KUA Kecamatan Pademawu menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007*, Skripsi, program studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Madura, Pembimbing: Dr. Hj. Siti Musawwamah, M. Hum.

Kata kunci: KUA, Pemeriksaan Nikah, Pegawai Pencatat Nikah

Pemeriksaan nikah adalah salah satu proses dalam pelaksanaan nikah yang harus dijalani oleh kedua calon pengantin dan juga wali yang ditugaskan kepada pegawai pencatat nikah dengan tujuan untuk mensinkronkan antara berkas dan fakta bahwa tidak adanya hal-hal yang dapat membatalkan perkawinan atau hal-hal yang dapat menjadi masalah dikemudian hari pasca perkawinan.

Fokus penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan pemeriksaan nikah di KUA Kecamatan Pademawu serta apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pemeriksaan nikah di KUA Kecamatan Pademawu.

Jenis penelitian ini menggunakan yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah jenis penelitian yang berkaitan dengan implementasi hukum yang hidup dalam masyarakat melalui perbuatan yang dilakukan baik dalam jajaran pemerintahan maupun yang dilakukan oleh masyarakat itu sendiri. Artinya kesinambungan antara hukum yang dibuat dengan hukum yang diterapkan. Sedangkan pendekatan penelitian yang digunakan adalah sosio-legal. Pendekatan sosio-legal dalam hukum empiris adalah pendekatan dengan studi lapangan untuk mengetahui bagaimana hukum bekerja dan beroperasi di masyarakat.

Hasil penelitian mengenai Problematika Pemeriksaan Nikah di KUA Kecamatan Pademawu menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 adalah penerapan hukum dan aturan yang dijalankan oleh petugas pemeriksa nikah di KUA Kecamatan Pademawu telah sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang ada, namun kendala yang dihadapi oleh petugas pemeriksa nikah hadir karena peraturan atau undang-undang yang kurang terperinci terkait pelaksanaan pemeriksaan nikah. Khususnya mengenai kesehatan bagi calon pengantin. Serta kurangnya perhatian pemerintah dalam meneliti lebih dalam terkait kendala yang dihadapi oleh petugas dalam pemeriksaan nikah di daerah.

ABSTRACT

Sarifatul Hidayah, 18201502010064, *Problems with Marriage Examination at the religious affairs office of the Pademawu District according to the Minister of Religion Regulation Number 11 of 2007*, Thesis, Islamic Family Law study program, Syariah Faculty, Madura State Islamic Institute of Religion, Advisor: Dr. Hj. Stiti Musawwamah, M. Hum.

Keywords: KUA, Marriage Examination, Marriage Registrar Employee

Marriage inspection is one of the process in the implementation of marriage that must be carried out by the bride and groom and also the guardian assigned to the marriage registrar. It mean to synchronise the files and the fact that there are no things that can make a marriage or things that can be a problem in the future. post-wedding day.

The focus of this research is how to carry out a marriage examination at the KUA of Pademawu District and what are the obstacles faced in the implementation of a marriage examination at the KUA of Pademawu District.

This type of research uses empirical juridical. Empirical juridical research is a type of research related to the implementation of the law that lives in society through actions carried out both within the ranks of government and carried out by the community it self. This means that there is continuity between the law made and the law applied. While the research approach used is socio-legal. The socio-legal approach in empirical law is an approach with field studies to find out how law works and operates in society.

The results of the study regarding the Problems with Marriage Examination at the religious affairs office of the Pademawu District according to the Minister of Religion Regulation Number 11 of 2007 are the application of laws and regulations carried out by marriage examiner officers at KUA Pademawu was appropriate with the existing regulations and laws, but the obstacles faced by marriage examiners are present because of regulations or laws that lack of detailed laws related to the implementation of marriage examinations. Especially regarding the health of the bride and groom. As well as the lack of government attention in examining more deeply related to the obstacles faced by officers in marriage examinations in the regions.